

**PENINGKATAN ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE FUND
MANAGEMENT MELALUI PENERAPAN INTERNAL CONTROL SYSTEM,
VILLAGE GOVERNMENT COMPETENCE DAN
SOCIETY PARTICIPATION
(Studi Pada Desa Se-Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)**

Veira Sylvia Sahrul¹

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
veirasyivia340@gmail.com¹

Anna Sofia Atichasari²

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
annasofia.msi@gmail.com²

Rida Ristiyana³

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
rydha.sangjuara01@gmail.com³

Abstract

This study aims to increase the accountability of village fund management through the application of a government internal control system, village government competence and society participation. The study population was all village governments in Cikupa sub-district, Tangerang Regency, Banten Province which consisted of 12 villages. The sampling method used purposive sampling which obtained 80 respondents and data analysis using multiple linear regression. The results found that the government internal control system and society participation had a positive significant effect on the accountability of village fund management and the competence of the village government did not affect on the accountability of village fund management

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Government Internal Control System, Village Government Competence, Society Participation,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah desa se-kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang terdiri dari 12 desa. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yang memperoleh 80 responden dan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

A. Pendahuluan

Cikupa merupakan kecamatan yang berada di kabupaten tangerang, provinsi banten dan berbatasan dengan kabupaten serang. Cikupa memiliki luas wilayah sebesar 42,68 km², dengan jumlah penduduk 289.065 jiwa

PENYALURAN DANA DESA KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017-2019				
NO	DESA	2017	2018	2019
1	Bojong	833,965,868	772,419,010	898,614,382
2	Sukadamai	874,571,547	983,655,917	990,821,836
3	Pasir Gadung	846,069,501	779,736,538	909,666,124
4	Sukanagara	810,222,864	733,371,979	842,992,183
5	Pasirjaya	856,524,261	828,644,306	981,709,185
6	Cikupa	818,833,723	765,944,920	876,921,413
7	Budi Mulya	796,698,675	738,888,504	850,627,424
8	Talaga	859,470,263	809,328,708	955,568,029
9	Cibadak	847,312,956	762,711,307	885,534,806
10	Dukuh	862,957,698	827,193,274	965,481,331
11	Talagasari	862,565,170	775,188,450	905,136,940
12	Bitung jaya	838,602,965	772,587,590	899,439,028
Jumlah		10,107,795,491	9,549,670,503	10,962,512,681

Sumber : Kemendes.go.id

(2017).

Gambar 1
Penyaluran Dana Desa Kecamatan Cikupa
Periode 2017-2019

Dari gambar 1 menunjukkan kabupaten tangerang berperan dalam membantu serta meningkatkan pembangunan desa dengan cara mengalokasikan *village fund* pemerintah kabupaten/kota untuk desa (Menteri Dalam Negeri RI, 2018). Mengingat, besarnya dana yang dialokasikan maka desa perlu mengelola dengan baik dan benar supaya sesuai dengan peruntukannya.

Periode 2015-2018 hasil penemuan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI atas kegiatan pembinaan dan

pengawasan pengelolaan *village fund* 33 provinsi yang terdiri dari 80 kabupaten dengan 5 kota serta 1.006 kecamatan di Indonesia menemukan belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum ada regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, *terupdate*, dan berdasarkan peraturan (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti polemik korupsi *village fund* yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015, *corruption of village funds* hingga 22 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus, melonjak 98 kasus pada 2017 dan 96 kasus pada 2018. Ini artinya *corruption of village funds* 2015-2018 mencapai 252 kasus. Seiring dengan peningkatan tersebut ICW merecord total kepala desa yang telah terjerat korupsi didesa juga ikut naik, sebanyak 214 kepala desa tersangkut *corruption case* selama periode itu. *Detailsnya* 15 kepala desa terjebak pada 2015, 61 kepala desa terjebak pada 2016, 66 kepala desa terjebak pada 2017, dan 89 kepala desa terjebak pada 2018. *Corruption of village funds*

ini terdiri dari perekayasa anggaran, *fictitious report*, penggelembungan *budget* serta suap. *Village budget corruption case* ini mengakibatkan kerugian Indonesia (negara) mencapai Rp 107.7 miliar (CNN Indonesia, 2019).

Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam (Jefri, 2018) *theory stewardship* adalah hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi dengan menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu institusi yang kredibel dan berorientasi sesuai dengan kepentingan publik dengan mandat serta fungsinya yang tepat untuk *public welfare*.

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan yang dipertanggungjawabkan (Menteri Dalam Negeri RI, 2018). Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan transparansi, akuntabel, partisipatif dan ketertiban dalam pelaksanaan anggaran. Demi menciptakan pengelolaan yang baik, pemerintah desa diharapkan bisa mengikuti syarat-

syarat tersebut yang salah satunya adalah akuntabilitas.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. SPI ini adalah proses aktivitas dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam memberikan keyakinan untuk dapat tercapainya tujuan kelompok/organisasi melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI No.60, 2008)

Melalui SPI ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan alokasi dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian (Martini et al., 2019) ; (Yesinia et al., 2018), SPI berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, sebaliknya (Rismawati, 2019) menunjukkan SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi pemerintah desa. Kompetensi merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi dalam pengelolaan keuangan

desa agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perangkat desa yang tidak memiliki kompetensi akan sulit dalam menyusun laporan keuangan karena perwujudan dari tercapainya akuntabilitas adalah pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar (Setyoko, 2011). Hasil penelitian (Umaira & Adnan, 2019) *village government competence* berpengaruh terhadap *accountability for village fund management* tetapi pada hasil penelitian (Sweetenia et al., 2019) memperoleh *village government competence* tidak berpengaruh terhadap *accountability for village fund management*.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya perencanaan desa untuk mengatur dan mengurus wilayah administratifnya sesuai dengan kewenangannya (*self governing community*) membangkitkan partisipasi masyarakat (kelompok miskin dan rentan diantaranya: anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus dll) untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan dapat

dirasakan bersama. Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa diharapkan dapat mengatur hak dan kewenangannya serta mengoptimalkan sumber kekayaan desa guna meningkatkan pembangunan desa.

Menurut penelitian (Umaira & Adnan, 2019) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pada penelitian (Kumalasari, 2018) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mereplikasi hasil penelitian (Umaira & Adnan, 2019). Unsur kebaruannya adalah terdapatnya *new variable* yaitu sistem pengendalian internal, pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan pada latarbelakang dan terdapatnya ketidakkonsistenan dari peneliti sebelumnya (*research gap*) maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian adalah :

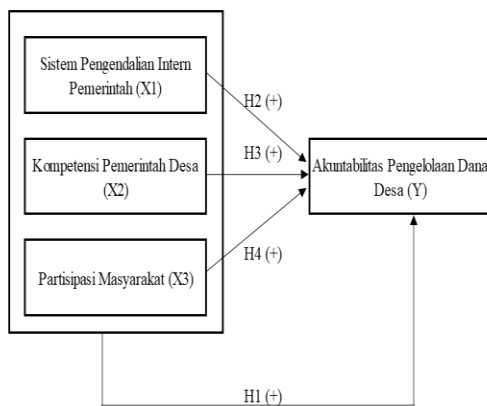
H₁: sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa dan

partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah (2020)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan sumber data primer melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner (skala *likert*). Populasi adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang yaitu sebanyak 12 Desa sejumlah 192 Pemerintah Desa. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Berikut kriteria sampel:

- 1) Perangkat Desa, terdiri dari Kepala Desa. Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Seluruh Aparat Desa yang *manage finance*.
- 2) Masa kerja minimal 6 bulan dengan tingkat minimal pendidikan SMA/SLTA Sederajat.

Teknik analisis data: statistik deskriptif, uji kualitas data (*validity test, reliability test*), uji asumsi klasik (*normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test*), regresi liner berganda, *model test (determination coefficient test dan uji F), hypothesis test (uji t)*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif menunjukkan data minimum, maksimum, mean, standar deviation dan ukuran sampel (Ghozali, 2018).

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
SPI	80	35	45	38,55	3,073
KPD	80	39	54	46,18	3,268
PM	80	16	30	25,03	2,634
APDD	80	104	150	126,07	10,194

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Uji Kualitas Data

Validity test

Validity test memperoleh semua variabel independen nilai r hitung > r tabel dan nilai signya < 0.05 ini artinya semua pernyataan (item) pada semua variabel adalah valid.

Reliability test

Tabel 2 Reliability test

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
SPI	0,847	Reliabel
KPD	0,832	Reliabel
PM	0,807	Reliabel
APDD	0,953	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Reliability test menunjukkan nilai cronbach alpha > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada riset ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Normality test

Tabel 3 Normality test

One-Sample Kolmogoro-Smirnov Test	
N	80
Test Statistic	0,098
Asymp. Sig (2-tailed)	0,055

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Normality test nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0.055 > 0.05 artinya nilai residual pada data penelitian berdistribusi normal

Multicollinearity test

Tabel 4 Multicollinearity test

	Coefficients	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPI	0,516	1,937
KPD	0,480	2,082
PM	0,563	1,777

Dependent Variable : APDD

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Multicollinearity test

memperoleh hasil untuk semua variabel independent nilai masing-masing tolerance > 0,1 dan VIF < 10, ini artinya variabel data penelitian tidak terkendala multikolinieritas

Autocorrelation test

Tabel 5 Autocorrelation test

Model Summary	
Adjusted R Square	0,655
Durbin-Watson	1,746
Predictors: PM, SPI, KPD	
Dependent Variable : APDD	

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Tabel 5 memperoleh nilai DW 1,746, k =4, n = 80 maka diperoleh DU 1,7430. Jadi DU < DW < 4-DU = 1,7430 < 1,746 < 2,257. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terkendala autokorelasi baik positif atau negatif.

Heteroscedasticity test

Tabel 6 Heteroscedasticity test

	t	Sig.
Constant	-1,527	0,131
SPI	1,586	0,117
KPD	0,963	0,338
PM	-1,154	0,252
Dependent Variable: Abs_RES		

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Heteroscedasticity test

memperoleh sig semua variabel > 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi penelitian tidak terkendala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std.Error
Constant	15,242	9,980
SPI	1,140	0,305
KPD	0,586	0,298
PM	1,591	0,341
Dependent Variable: APDD		

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Dari tabel 7 memperoleh persamaan model regresi sbb:

$$APDD = 15,242 + 1,140 SPI + 0,586 KPD + 1,591 PM + 9,980$$

Model test

Determination coefficient test (R²)

Tabel 8 Det.Coefficient test

Model Summary		
1	R Square	Adjusted R Square
	0,668	0,655
Predictors : (Constant), PM, SPI,KPD		
Dependent Variable : APDD		

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Hasil nilai Adjusted R Square adalah 0,655 atau 65,5%. Ini berarti kontribusi yang diberikan oleh variabel independent sebesar 65,5% dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, sisanya 34,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9 Uji F

ANOVA			
Model	df	F	Sig
Regression	3	50,889	0,000
Residual	76		
Total	79		
Dependent Variable: APDD			
Predictors: PM, SPI, KPD			

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Uji F menunjukkan nilai Fhitung 50,889 > Ftabel 2,73 dengan df1 =3 dan df2 =75 sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini sekaligus menjawab H₁.

Hypothesis test

Uji Parsial (uji-t)

Tabel 10 Uji t

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error		
Constant	15,242	9,980	1,527	0,131
SPI	1,140	0,305	3,734	0,000
KPD	0,586	0,298	1,970	0,053
PM	1,591	0,341	4,661	0,000
Dependent Variable: APDD				

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Uji t memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua mengatakan SPI berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini senada dengan pengujian pada riset ini yang memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,734 >$ nilai t_{tabel} sebesar $1,66515$ serta nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik SPInya maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sebaliknya. Ini disebabkan karena pemerintah desa di kecamatan Cikupa selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang. Tercermin dari hasil kuesioner responden yang menjawab setuju 56 orang (70%), sangat setuju 22 orang (27,50%) dan kurang setuju 2 orang (2,50 %). Selain itu, pemerintah desa kecamatan Cikupa sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, terbukti dari hasil jawaban responden sebanyak 42 orang (52,50%) yang menjawab setuju dan 38 orang (47,5%) yang menjawab sangat setuju. Pemerintah desa kecamatan Cikupa juga memiliki kejelasan tugas dan wewenang dalam pemerintah desa tercermin dari jawaban responden yang menjawab

setuju sebanyak 55 orang (68,75%) dan sangat setuju 25 orang (31,25%). Memiliki perlindungan terhadap peralatan dan persediaan ditempat yang aman. Tercermin dari jawaban setuju 53 orang (66,25%) dan sangat setuju 27 orang (33,75%). Mempunyai rencana pengelolaan/mengurangi resiko pelanggaran yang terlihat dari jawaban responden, menjawab setuju 56 orang (70%), sangat setuju 22 orang (27,5%), kurang setuju 1 orang (1,25%) dan tidak setuju 1 orang (1,25%). SPI yang lain tercermin pada pengeluaran uang pada PemDes selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas, menjawab setuju 46 orang (57,5%) dan sangat setuju 34 orang (42,5%). Adanya otoritas atas aktivitas transaksi yang terbukti dari jawaban setuju 53 orang (66,25%), sangat setuju 12 orang (15%), kurang setuju 14 orang (17,5%) dan tidak setuju 1 orang (12,5%). Komunikasi dilaksanakan secara terbuka dan efektif terbukti dari jawaban responden yang menjawab setuju 47 orang (58,75%) dan sangat setuju 32 orang (40%) dan kurang setuju hanya 1 orang (1,25%). Adanya tindak lanjut dari setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh inspektorat, jawaban

setuju sebanyak 61 orang (76,25%), sangat setuju 17 orang (21,25%), dan kurang setuju 1 orang (1,25%) serta tidak setuju 1 orang (1,25%). Berdasarkan pada uraian diatas menunjukkan bahwa SPI 12 Desa Kecamatan Cikupa adalah baik (*good*) sehingga hal inilah yang akan meningkatkan *accountability for village fund management*.

Akuntabilitas di Kecamatan Cikupa sudah menerapkan pembatasan dimana pemerintah desa tidak menerima pungutan diluar ketentuan Perda, selain itu jumlah uang kas yang disimpan hanya digunakan untuk kebutuhan operasional Pemda, adanya rincian anggaran biaya untuk hal tidak terduga dan semua pengeluaran sesuai dengan RAB, *diapproval* dan SPP yang lengkap. Hal ini yang memicu SPI menjadi baik yang diiringi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang semakin baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Hasanah et al., 2020); (Martini et al., 2019); (Pradana et al., 2019); (Yesinia et al., 2018) yang menyatakan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil ini berseberangan dengan (Mutmainah & Pramuka, 2017); (Santoso, 2016) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *accountability for village fund management*.

Pengaruh Kompetensi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga mengatakan kompetensi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sejalan dengan pengujian pada penelitian ini yang memperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,970 >$ nilai t_{tabel} sebesar $1,66515$ serta nilai signifikansi sebesar $0,053 > 0,05$. Artinya kompetensi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *accountability for village fund management*.

Adanya kompetensi pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak apapun terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa berpendidikan paling rendah adalah tamatan SMA/ sederajat yang dijawab oleh responden setuju 44 orang (55%), sangat setuju 35 orang (43,75%) dan tidak setuju 1 orang

(1,25%); Pemerintah desa belum sepenuhnya memahami ilmu akuntansi, terbukti dari hasil jawaban pemahaman akuntansi yang menjawab kurang setuju 10 orang (12,5%), setuju (62%), sangat setuju 8 orang (10%). Belum semua pemerintah desa dapat mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan jawaban responden sebanyak 3 orang (3%); masih belum adanya upaya dalam penyelesaian tugas tanpa terjadi kesalahan yang dibuktikan dengan 6 orang (7,5%), dan terdapatnya ketidaksenangan melakukan pekerjaan yang dijalani 3 orang (3,75%) dan adanya ketidakmampuan dalam membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya 3 orang (3,75%). Dari data-data tersebut dapat disimpulkan kompetensi pemerintah desa masih masih dirasa kurang. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa tidak berkembang dengan baik, sehingga pengelolaan keuangannya belum optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sweetenia et al., 2019); (Widyatama et al., 2017) yang menemukan kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Lain halnya dengan (Umaira & Adnan, 2019); (Pradana et al., 2019); (Mada et al., 2017) (Santoso, 2016) yang menemukan kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keempat mengatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini senada dengan pengujian pada penelitian ini yang memperoleh t_{hitung} sebesar 4,661 > nilai t_{tabel} sebesar 1,66515 serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sebaliknya. Ini disebabkan masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan program-program desa dengan setuju 48 orang (60%), sangat setuju 26 orang (32,5%), kurang setuju 2 orang saja (2,5%) dan tidak setuju hanya 4 orang (5%). Selain itu masyarakat juga memberikan masukan

kepada BPD tercermin dalam jawaban setuju 52 orang (65%), sangat setuju 26 orang (32,5%), kurang setuju hanya 2 orang (2,5%). Masyarakat desa juga sebagian membuat dan mengusulkan rencana pilihan (*options*) terhadap *budget plan* desa yang nantinya diajukan kepala desa dan/BPD dengan 50 orang (62,5%) menjawab setuju, sangat setuju 10 orang (12,5%), kurang setuju 15 orang (18,75%) dan tidak setuju 5 orang (6,25%). Selain itu, masyarakat juga Sebagian ikut terlibat dalam rapat dengar pendapat dan rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa, 48 orang (60%) menjawab setuju, 27 orang (33,75%) menjawab sangat setuju dan 3 orang (3,75%) menjawab kurang setuju, sisanya 2 orang (2,5%) menjawab tidak setuju. Disisi lain masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa dengan 46 orang (57,5%) menjawab setuju, 31 orang (38,75%) menjawab sangat setuju dan 2 orang (2,5%) kurang setuju, sisanya 1 orang (1,25%) yang menjawab tidak setuju. Partisipasi lainnya juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran desa, tercermin dari 63 orang (78,75%) menjawab

setuju, 14 orang saja (17,5%) menjawab sangat setuju, dan 2 orang saja (2,5%) kurang setuju, sisanya 1 orang (1,25%) mengemukakan tidak setuju. Pada uraian diatas dapat disimpulkan masyarakat memang aktif dalam berpartisipasi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin tinggi pula akuntabilitasnya dan sebaliknya. Akuntabilitas Kecamatan Cikupa sudah baik terlihat dari kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dalam pertimbangan utama terkait pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cikupa, adanya keterbukaan informasi perencanaan keuangan desa kepada publik serta adanya kebijakan penggunaan desa yang mudah diakses oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Umaira & Adnan, 2019); (Rismawati, 2019); (Mada et al., 2017) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bertentangan dengan (Pradana et al., 2019); (Kumalasari, 2018) yang menemukan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap *accountability for village fund management*.

D. Simpulan

Pada pembahasan dapat dibuat kesimpulan yaitu: *internal control system* dan *society participation* berpengaruh positif signifikan terhadap *accountability for village fund management*, sedangkan *village government competence* tidak berpengaruh terhadap *accountability for village fund management*. Saran yang bisa kami sampaikan untuk penelitian berikutnya adalah menambah lokasi studi tidak hanya satu kecamatan namun bisa beberapa kecamatan supaya lebih *general* dan menambah variabel lain selain yang diteliti supaya terlihat factor apa saja yang dapat terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan desa. Bagi instansi/pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dengan memanfaatkan sistem pengendalian internal yang konsisten, kompetensi pemerintah yang berkualitas dan melibatkan masyarakat untuk dapat aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah desa.

E. Daftar Pustaka

CNN Indonesia. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat*.
<https://www.cnnindonesia.com/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah*. www.dpr.go.id.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25* (UNDIP (ed.); 9th ed.). Universitas Diponegoro.
<https://imamghozali.com/produk-39-.html>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27.
<https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kumalasari, L. (2018). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Dikecamatan Bayat)*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.

- <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Menteri Dalam Negeri RI. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20*, 1–120.
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Peraturan Pemerintah RI No.60. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
[Http://Www.Bpkp.Go.Id/](http://www.bpkp.go.id/)
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf
- Pradana, A. A., Arizona, I. P. E., & Ernawatiningsih, N. P. L. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desaterhadap Akuntabilitas Pengelolaan Lokasi Dana Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–23.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamat.*
- Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) The Influence Of Internal Governmental Contro. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Setyoko, P. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/589>
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.
<https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*,

- 4(3), 471–481.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
<https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>